

PENGARUH KOMPETENSI APARATUR, PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAN PERAN INTERNAL AUDIT TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PALU

Ruswanto Ngguna¹, Muliati dan Fadli Moh. Saleh²

rngguna@yahoo.co.id

¹Mahasiswa Program Studi Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Tadulako

²Dosen Program Studi Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Tadulako

Abstract

This research aims to describe the influence of apparatus competence, utilization of financial information systems and the role of internal audit on the quality of local government financial statements of Palu City. This research type was quantitative with survey research method. The sample in this research was the leader and staff of the regional finance management unit as much as 70 respondents, the sample was taken using purposive sampling technique. The research data were collected by using questionnaires and interviews. Validity Test of questionnaire using product moment and reliability test using split half. Hypothesis test was used multiple regression analysis. The research results show that; First, apparatus competence have a significant effect on the quality of the financial statements of Palu city government. Second, the utilization of financial information system have insignificant effect on the quality of financial statements of Palu city government. And the last, the internal audit role has a significant effect on the quality of the financial statements of Palu city government.

Keywords: *Apparatus Competency, Financial Information System, Internal Audit Role, Quality of Local Government Financial Report of Palu City.*

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan dokumen pertanggung jawaban pemerintah atas penerimaan dan penggunaan dana yang bersumber dari masyarakat. Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-undang nomor 1 tahun 2004, maka pemerintah menyempurnakan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Salah satu kandungan penting adalah perubahan penyusunan laporan keuangan pemerintah dan penerapan basis *accrual*.

Kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dapat tercermin dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Adapun kriteria pemberian opini menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pernyataan Profesional Pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam

laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria:

- 1) Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan;
- 2) Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*);
- 3) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undang; dan
- 4) Efektivitas sistem pengendalian intern.

Bastian (2011) mengemukakan bahwa pendapat wajar tanpa pengecualian dapat diberikan oleh auditor apabila telah dilaksanakan sesuai dengan standar auditing, penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan tidak terdapat kondisi atau keadaan tertentu yang memerlukan bahasa penjas.

Pemerintah Daerah Kota Palu merupakan salah satu entitas pelaporan, sehingga wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan berdasarkan PP. No. 71 tahun 2010. Sebagai entitas pelaporan Pemerintah Daerah Kota Palu mempunyai

kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan (a) akuntabilitas, (b) manajemen, (c) transparansi, (d) keseimbangan antar generasi (*intergenerational equity*), (e) evaluasi kinerja.

Sejak dimulai dari tahun 2006 Pemerintah Daerah Kota Palu memperoleh opini sebagai berikut:

Tabel 1. Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Palu Tahun 2006-2015

Tahun Pelaporan	Dasar Penyusunan	Opini Audit
2006	PP. No. 24 Tahun 2005	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2007	PP. No. 24 Tahun 2005	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2008	PP. No. 24 Tahun 2005	Tidak Menyatakan Pendapaat (<i>disclaimer</i>)
2009	PP. No. 24 Tahun 2005	Tidak Menyatakan Pendapaat (<i>disclaimer</i>)
2010	PP. No. 71 Tahun 2010 Lampiran 2	Tidak Menyatakan Pendapaat (<i>disclaimer</i>)
2011	PP. No. 71 Tahun 2010 Lampiran 2	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2012	PP. No. 71 Tahun 2010 Lampiran 2	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2013	PP. No. 71 Tahun 2010 Lampiran 2	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2014	PP. No. 71 Tahun 2010 Lampiran 2	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2015	PP. No. 71 Tahun 2010 Lampiran 1	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Sumber : Diolah kembali dari data DPPKAD Kota Palu

Tuntutan perbaikan dalam pelaporan keuangan pemerintah harus dijawab dengan perbaikan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Safrida Yuliani, Nadrasyah dan Usman Bakar (2010) mengemukakan rendahnya kualitas laporan keuangan dapat disebabkan oleh pemahaman akuntansi dari penyusun laporan keuangan itu sendiri atau belum diterapkan secara optimal sistem informasi akuntansi keuangan dan peran internal audit dan atau peran internal audit masih lemah.

Beberapa hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan perbedaan hasil

penelitian antara penelitian satu dengan penelitian lain yang meneliti tentang kualitas laporan keuangan pemerintah. Lilis Setyowati, dan Wikan Istihika (2014) Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, berpengaruh terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan Kota Semarang. Hasil tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Akhmad (2014), yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Safrida Yuliani, Nadrasyah dan Usman Bakar (2010), menyatakan bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hasil ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Lilis Setyowati, dan Wikan Istihika (2014), menyatakan bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi tidak berpengaruh terhadap peningkatan laporan keuangan daerah Kota Semarang, sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dyah Puri Surastini dan Bestari Dwi Handayani (2015) dimana mereka menyimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak mempunyai pengaruh terhadap kualitas informasi keuangan pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Lilis Setyowati, dan Wikan Istihika (2014), menunjukkan bahwa peran internal audit berpengaruh terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan Kota Semarang. Hasil tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Akhmad (2014), yang menyatakan bahwa internal audit tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Pada dasarnya, kualitas laporan keuangan menunjukkan kualitas kompetensi SDM penyusun laporan keuangan tersebut, sistem yang digunakan dan juga kebijakan yang ditetapkan pemerintah setempat, serta peran internal audit dalam melakukan

pengawasan dan evaluasi atas program-program kegiatan pemerintah daerah.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori kegunaan-keputusan (*decision-usefulness theory*) informasi akuntansi. Teori kegunaan keputusan informasi akuntansi tercermin dalam bentuk kaidah-kaidah yang harus dipenuhi oleh komponen-komponen pelaporan keuangan agar dapat bermanfaat dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi.

Teori kegunaan keputusan memberikan pemahaman bahwa informasi akuntansi yang disajikan dalam laporan keuangan mengandung komponen-komponen yang perlu dipertimbangkan oleh penyaji informasi akuntansi agar cakupan informasi dalam laporan keuangan dapat memenuhi kebutuhan para pengambil keputusan yang akan menggunakannya. Teori kegunaan keputusan mencakup mengenai syarat dari kualitas informasi akuntansi yang berguna dalam keputusan yang akan diambil oleh pengguna. Premis dari teori kegunaan-keputusan adalah 1) Tujuan akuntansi adalah menyediakan informasi finansial mengenai perusahaan guna pengambilan keputusan; 2) Tujuan akuntansi dikaitkan dengan investor adalah menyediakan informasi finansial mengenai suatu perusahaan yang akan digunakan dalam pembuatan keputusan investasi; 3) Investor mencakup pengertian pemilik dan kreditur. Penelitian ini mengkaji kompetensi aparatur, pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah, internal audit dan kualitas laporan keuangan daerah.

Penelitian ini menggunakan tiga variabel independen yaitu Kompetensi Aparatur, Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan dan Peran Internal Audit.

Kompetensi merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*), dan kemampuan (*ability*) untuk melaksanakan suatu pekerjaan (Hevesi 2005). Berdasarkan dari definisi kompetensi dapat diartikan bahwa kompetensi adalah karakter yang mendasar dan melekat pada diri

seseorang yang memungkinkan orang tersebut melakukan/ menghasilkan kinerja yang sangat baik.

Penggunaan teknologi informasi diperlukan dalam proses penyusunan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Menurut Hamzah dalam Nurillah (2014) Pemanfaatan teknologi informasi mencakup adanya (a) pengolahan data, pengolahan informasi, system manajemen dan proses kerja secara elektronik dan (b) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat. Sedangkan menurut Dyah Puri Surastiani dan Bestari Dwi Handayani (2015) mengemukakan bahwa pengembangan dan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan, dan menyalurkan informasi keuangan kepada pelayanan publik.

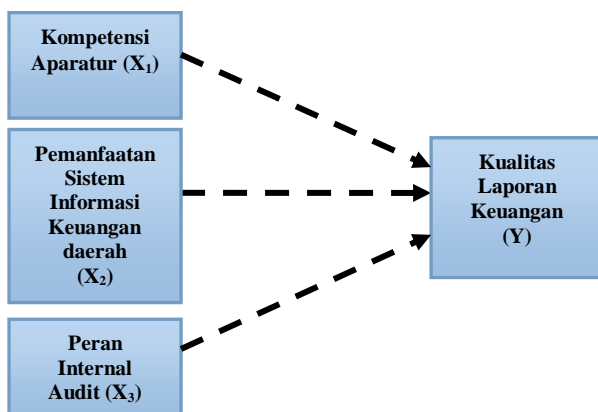
Sawyer (2005) mengemukakan Audit internal adalah sebuah penilaian yang sistematis dan objektif yang dilakukan auditor internal terhadap operasi dan kontrol yang berbeda-beda dalam organisasi untuk menentukan apakah :

- 1) Informasi keuangan dan operasi telah akurat dan dapat diandalkan,
- 2) Risiko yang dihadapi perusahaan telah diidentifikasi dan diminimalisasi,
- 3) Peraturan eksternal serta kebijakan dan prosedur internal yang biasa diterima telah diikuti,
- 4) Kriteria operasi yang memuaskan telah dipenuhi,
- 5) Sumber daya telah digunakan secara efisien dan ekonomis, dan
- 6) Tujuan organisasi telah dicapai secara efektif semua dilakukan dengan tujuan untuk dikonsultasikan dengan manajemen dan membantu anggota organisasi dalam menjalankan tanggung jawabnya secara efektif.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana gambaran umum kompetensi aparatur, pemanfaatan sistem informasi keuangan dan peran internal audit di Kota Palu ?
- 2) Apakah kompetensi aparatur berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Palu?
- 3) Apakah pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Palu?
- 4) Apakah peran internal audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Palu?

Kerangka pemikiran penelitian ini merupakan hubungan logis dari landasan teori dan kajian empiris yang telah dijelaskan dapat dilihat pada Gambar 1 sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian

Kompetensi Aparatur merupakan karakter yang mendasar dan melekat pada diri seseorang yang memungkinkan orang tersebut melakukan/menghasilkan kinerja yang sangat baik untuk menghasilkan keluaran-keluaran (*outputs*) dan hasil-hasil (*outcomes*). Oleh karena itu, jika penempatan orang-orang yang terlibat secara langsung dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah tidak memiliki atau tidak sesuai dengan kompetensi akuntansi, maka akan berdampak terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Sehingga kualitas laporan keuangan yang disusun tidak relevan, dan

tidak andal karena tidak dikelola oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi akuntansi.

METODE

Populasi dalam penelitian ini adalah Pimpinan dan Staf Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). Penetapan SKPKD sebagai populasi di dasarkan pada tugas pokok dan fungsi dari instansi pemerintah tersebut sesuai dengan pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Teknik penentuan sampel dalam hal ini adalah menggunakan metode *Purposive Sampling* dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang *representative* sesuai dengan kriteria yang ditentukan.

Pegawai pada SKPKD Kota Palu terdapat 81 pegawai. Berdasarkan hasil perhitungan sampel dengan teknik *purposive sampling* terdapat 77 responden yang memenuhi kriteria penelitian. Namun penelitian ini mengidentifikasi 70 responden dikarenakan ketidak bersedia responden untuk mengembalikan kuisioner penelitian.

Variabel dalam penelitian ini ada 4 yaitu satu variabel dependen dan tiga variabel independen. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu kompetensi aparatur, pemanfaatan sistem informasi keuangan, dan peran internal audit. Definisi operasional variabel dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2. Matriks Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi	Indikator	Skala Pengukuran
Kualitas laporan keuangan (Y) PP. 71 Tahun 2010	✧ Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan yang dia dopsi sesuai PP nomor 71 tahun 2010 yang dikembangkan dari indikator variabel yang meliputi nilai relevansi, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami	✧ Mempunyai nilai yang relevan ✧ Mempunyai nilai keterandalan ✧ Dapat dibandingkan ✧ Dapat dipahami oleh pemakai informasi	Ordinal
Kompetensi (X1) As Syifa Nurillah (2014)	✧ Kompetensi adalah suatu karakteristik dari seorang yang memiliki keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan untuk melaksanakan suatu pekerjaan (Hevesi, 2005 dalam Nunillah, 2014).	✧ Pengetahuan ✧ Keterampilan ✧ Kemampuan	Ordinal
Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan (X2) Dyah Puri Surastiani dan Bestari Dwi Handayani (2015)	✧ Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangana dalah pengembangan dan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan, dan menyuluhkan informasi keuangan kepada pelayanan publik, Dyah dan Bestari (2015).	✧ Sistem Akuntansi Sesuai dengan SAP ✧ Jaringan Internet Tersedia ✧ Jaringan Internet Termanfaatkan Dengan Baik ✧ Aplikasi yang digunakan ✧ Laporan Keuangan ✧ Software sesuai dengan Undang-undang	Ordinal
Internal Audit (X3) Safrida Yuliani, Nadirsyah, dan Usman Bakar (2010)	✧ Internal Audit adalah suatu aktivitas independen, keyakinan objektif dan konsultasi yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi, Safrida dan Usman (2010)	✧ Penilaian Keandalan Informasi Keuangan ✧ Penilaian Ketaatan ✧ Penilaian Kinerja ✧ Penilaian Efisiensi dan Efektivitas Program ✧ Tingkat obyektivitas auditor internal	Ordinal

Sumber : data diolah

Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner, yang dibagikan pada pegawai SKPKD Kota Palu dan wawancara.

Teknik analisis data pada pengujian hipotesis menggunakan pengujian analisis regresi liner berganda untuk menguji pengaruh dan melihat antara dua atau lebih variabel. Persamaan model empiris yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + \dots + b_k X_k + e$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengujian validitas terhadap kuisiонер yang digunakan dalam penelitian ini, maka dapat diketahui nilai validitas dari 10 pernyataan yang mewakili variabel X_1 (kompetensi aparatur), 12 pernyataan yang mewakili variabel X_2 (pemanfaatan sistem informasi keuangan), 10 pernyataan yang mewakili variabel X_3 (peran internal audit), dan 10 pertanyaan yang mewakili variabel Y (kualiatas laporan keuangan pemerintah daerah). Pengujian validitas yang telah dilakukan dengan menggunakan softwere SPSS 16.0 for windows. Hasil uji validitas menunjukkan nilai korelasi (pearson Corellation) $\geq 0,3$ sehingga pernyataan dalam instrumen penelitian dinyatakan valid.

Uji realibilitas dalam penelitian ini menggunakan teknik uji statistik belah dua (*split half*) yang dianalisis dengan rumus *Spearman Brown*. Untuk melihat andal atau tidaknya suatu konstruk atau variabel jika memberikan nilai *split half* $> 0,60$, maka secara keseluruhan pernyataan tersebut dinyatakan andal. Hasil uji realibilitas menunjukkan bahwa koefisien *split half*, masing-masing varaibel penelitian nilainya lebih besar dari 0,60, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item dari setiap variabel adalah reliabel dan dapat diuji lebih lanjut.

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan independen keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Hasil uji normalitas menunjukkan tampilan grafik P-plot yang memperlihatkan sebaran titik-titik yang menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Sedangkan tampilan grafik histogram pada posisi seimbang dan berpola distribusi secara normal. Hasil uji normalitas dapat disimpulkan bahwa data penelitian berdistribusi normal sehingga model regresi layak dipakai karena memenuhi asumsi normalitas.

Uji *multikololinieritas* bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas penelitian. Hasil uji *multikololinieritas* dapat dilihat bahwa nilai *tolerance* dari variabel bebas kompetensi aparatur $0,700 > 0,10$, pemanfaatan sistem informasi keuangan $0,650 > 0,10$, dan peran internal audit $0,630 > 0,10$. Nilai *Variance Inflantion Factor* (VIF) dari variabel bebas kompetensi aparatur $1,428 < 10$, pemanfaatan sistem informasi keuangan $1,539 < 10$, dan peran internal audit $0,630 < 10$. Dengan demikian dapat disimpulkan dalam model regresi tidak terjadi multikolineritas antar variabel bebas tersebut.

Pengujian *heteroskedastisitas* di maksudkan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians

dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut *homoskedastisitas* dan jika berbeda disebut *heteroskedastisitas*. Model regresi yang baik adalah yang *homoskedastisitas*. Hasil uji *heteroskedastisitas* menunjukkan tampilan grafik *scatterplot* bahwa sebaran data tidak membentuk pola yang jelas, titik-titik data menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak terjadi *heteroskedastisitas*.

Model regresi berganda dalam penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh variabel kompetensi aparatur (X_1), pemanfaatan sistem informasi keuangan (X_2), dan peran internal audit (X_3) terhadap variabel dependen kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y).

Berdasarkan perhitungan regresi linier berganda antara kompetensi aparatur, pemanfaatan sistem informasi keuangan dan peran internal audit terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan menggunakan *software* SPSS 16.0 for windows maka didapat persamaan sebagai berikut:

$$Y = 11,816 + 0,254 X_1 + 0,191 X_2 + 0,261 X_3$$

Berikut adalah penjelasan berdasarkan persamaan regresi berganda yang terbentuk :

1. Baik konstanta maupun koefisien variabel-variabel independen memiliki nilai positif. Hal ini menandakan bahwa persamaan regresi berganda tersebut memiliki hubungan yang searah. Yang berarti kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan meningkat seiring dengan meningkatnya kompetensi aparatur, pemanfaatan sistem informasi keuangan dan peran internal audit.
2. Konstanta sebesar 11,816 berarti bahwa pengelola keuangan daerah tetap dapat menghasilkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar konstanta meskipun variabel independennya (bebas) nol.
3. Nilai koefisien regresi variabel kompetensi aparatur (X_1) = 0,254. Ini berarti apabila

terjadi peningkatan kompetensi aparatur sebesar 1 poin dengan asumsi variabel lain dianggap konstan (X_2 dan $X_3 = 0$), maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan meningkat sebesar 0,254.

4. Nilai koefisien regresi variabel pemanfaatan sistem informasi keuangan (X_2) = 0,191. Ini berarti apabila terjadi peningkatan pemanfaatan sistem informasi keuangan sebesar 1 poin dengan asumsi variabel lain dianggap konstan (X_1 dan $X_3 = 0$), maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan meningkat sebesar 0,191.
5. Nilai koefisien regresi variabel peran internal audit (X_3) = 0,261. Ini berarti apabila terjadi peningkatan peran internal audit sebesar 1 poin dengan asumsi variabel lain dianggap konstan (X_1 dan $X_2 = 0$), maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan meningkat sebesar 0,261.

Menentukan pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat digunakan uji t. Nilai t_{tabel} dengan jumlah observasi 70, variabel bebas 3 dan $\alpha = 5\%$ sebesar 1,99601. Dari hasil pengujian didapat nilai t hitung sebagai berikut:

a. Pengujian Hipotesis 1

Hasil estimasi variabel kompetensi aparatur diperoleh nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,119 > 1,99601$ dengan signifikansi sebesar $0,038 < 0,05$. Nilai t_{hitung} yang lebih besar dari t_{tabel} dan nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa dengan adanya kompetensi aparatur berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sehingga berdasarkan hal tersebut hipotesis pertama yang menyatakan bahwa "*Kompetensi Aparatur berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah*" dinyatakan diterima.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh SKPKD Kota Palu dalam meningkatkan kualitas kompetensi pegawainya dengan memberikan kesempatan kepada para pegawai untuk mengikuti bimbingan teknis baik secara regional maupun nasional serta dialog dan

diskusi antar pegawai terkait perkembangan informasi keuangan pemerintah daerah.

Kompetensi yang dimiliki oleh staf untuk melaksanakan pekerjaannya telah memadai walaupun secara latar belakang pendidikan masih sangat kurang yang berlatar pendidikan akuntansi, dengan adanya lama bekerja dan pekerjaan yang dikerjakan secara terus menerus ditambah arahan dari orang yang lebih mengerti tentang pekerjaan terkait penyusunan laporan keuangan sehingga staf dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik dan menambah kompetensi yang mereka miliki. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurillah (2014) yang menyatakan bahwa bahwa kompetensi sumber daya manusia, berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

b. Pengujian Hipotesis 2

Hasil estimasi variabel pemanfaatan sistem informasi keuangan diperoleh nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $1,536 < 1,99601$ dengan signifikansi sebesar $0,129 > 0,05$. Nilai t_{hitung} yang lebih kecil dari t_{tabel} dan nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa dengan adanya pemanfaatan sistem informasi keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sehingga berdasarkan hal tersebut hipotesis kedua yang menyatakan bahwa “*Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah*” dinyatakan ditolak.

Seluruh proses pengelolaan keuangan pada Pemerintah Kota Palu telah menggunakan sistem komputerisasi. Pemerintah Kota Palu dalam pengelolaan keuangan menggunakan dua aplikasi. Aplikasi SIMDA digunakan untuk proses perencanaan APBD, Penatausahaan dan Perbendaharaan, dan Laporan Realisasi Anggaran. Sedangkan aplikasi SIMBAD digunakan untuk inventarisasi Aset. Aplikasi yang digunakan telah dibuat berdasarkan peraturan dan

perundang-undangan pengelolaan keuangan daerah

Pemanfaatan aplikasi SIMDA dan SIMBAD belum maksimal hal ini ditunjukkan oleh laporan keuangan yang disusun oleh Pemerintah Kota Palu bukan merupakan output dari sistem tersebut, melainkan data-data keuangan yang diperoleh dari sistem diolah kembali secara manual untuk disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Masih belum terintegrasi antara sistem simda dan simbad dalam pelaporan keuangan sehingga *output* laporan yang disajikan oleh masing-masing aplikasi masih berdiri sendiri.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lilis Setyowati dan Wikan Istihika (2014) yang menyatakan bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi tidak berpengaruh terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan daerah Kota Semarang. Begitu juga dengan Dyah Puri Surastiani dan Bestari Dwi Handayani (2015) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak mempunyai pengaruh terhadap kualitas informasi keuangan pemerintah daerah.

c. Pengujian Hipotesis 3

Hasil estimasi variabel peran internal audit diperoleh nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,065 > 1,99601$ dengan signifikansi sebesar $0,043 < 0,05$. Nilai t_{hitung} yang lebih besar dari t_{tabel} dan nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa dengan adanya peran internal audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sehingga berdasarkan hal tersebut hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa “*Peran Internal Audit berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah*” dinyatakan diterima.

Sesuai dengan tugas dan fungsi internal audit yaitu memberikan jasa konsultasi dan melakukan review terhadap laporan keuangan pemerintah daerah, auditor internal telah memberikan kontribusi terhadap penyusunan

laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas.

Adanya auditor internal memberikan koreksi atas kesalahan-kesalahan yang ditimbulkan akibat ketidaktahuan atau kelalaian yang dilakukan oleh pengelola aparatur keuangan daerah, sehingga sebelum dilakukannya audit oleh BPK laporan yang disajikan sudah terhindar dari salah saji yang material.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lilis Setyowati, dan Wikan Istihika (2014) serta Nurillah (2014) yang menunjukkan bahwa peran internal audit berpengaruh terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan daerah.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Palu sangat baik, hal tersebut dapat dilihat dari opini wajar tanpa pengecualian yang diberikan oleh BPK pada tahun 2015. Kompetensi aparatur dan peran internal audit pada SKPKD Kota Palu telah memadai, sedangkan Pemanfaatan sistem informasi keuangan belum dilakukan secara maksimal.
2. Kompetensi Aparatur berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. Hal ini berarti bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan meningkat seiring dengan meningkatnya kompetensi aparatur pemerintah daerah.
3. Kompetensi Aparatur tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. Hal ini berarti peningkatan kualitas laporan keuangan tidak dipengaruhi oleh adanya peningkatan maupun penurunan pemanfaatan sistem informasi keuangan.
4. Peran Internal Audit berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan

Keuangan Pemerintah. Hal ini berarti bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan meningkat seiring dengan meningkatnya peran internal audit pemerintah daerah.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka diajukan rekomendasi, antara lain:

1. Untuk Pemerintah Daerah Kota Palu diharapkan:
 - a. Penempatan pegawai di lingkungan pengelolaan keuangan sebaiknya yang belatar belakang pendidikan akuntansi dan secara berkala melakukan pendidikan dan pelatihan terhadap pegawai pengelola keuangan.
 - b. Perlu dipertimbangkan penggunaan aplikasi yang dapat bersinergi antara aplikasi keuangan, pendapatan dan aset.
 - c. Pemberian akses seluas-luasnya terhadap auditor internal dalam melakukan pengawasan dan review penggunaan dan penerimaan dana pemerintah daerah.
2. Penelitian selanjutnya hendaknya dapat mempertimbangkan untuk menambah variabel lain yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah seperti peran BPKP dan Kementerian Keuangan.

DAFTAR RUJUKAN

- Akhmad Syarifudin. 2014. Pengaruh Kompetensi SDM dan Peran Audit Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (studi empiris pada Pemkab Kebumen). *Jurnal Fokus Bisnis*. Volume 14, No 02, bulan Desember 2014.
- Nurillah, As Syifa. 2014. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan

- Daerah (SIKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kota Depok). *Diponegoro Journal Of Accounting*. Volume 3 Nomor 2 Tahun 2014 ISSN (online): 2337-3806.
- Dyah Puri Surastini dan Bestari Dwi Handayani. 2015. Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Dinamika Akuntansi*. Vol. 7, No. 2, September 2015, pp. 139-149 ISSN 2085-4277.
- Havesi, G. Alan. 2005. *Standards for Internal Control in New York State Government*. www.osc.state.ny.us
- Bastian, Indra. 2011. *Audit Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat .
- Lilis Setyowati, dan Wikan Isthika. 2014. Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Semarang. *Proseding 2014*.
- Republik Indonesia. 2003 Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- _____. 2004 Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- _____. 2004 Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.
- _____. 2005 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- _____. 2005 Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD).
- _____. 2006 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- _____. 2008 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- _____. 2010 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Safrida Yuliani, Nadrsyah dan Usman Bakar. 2010. Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Peran Interna Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (studi pada Pemerintah Kota Banda Aceh): *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*. Vol. 3. No. 2. Juli 2010.
- Sawyer, Lawrence B. 2005. *Internal Auditing*, Edisi Kelima. Penerjemah Desi Adhariani. Jakarta: Salemba Empat.